

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
---	---

KODE:  LISTRIK  MINERAL, BATU BARA  GEOLOGI  
 MIGAS  DAN PANAS BUMI  UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

■ Menteri ESDM:  
**Investasi Pertambangan  
Tetap Menarik**

Jakarta-Investasi di sektor pertambangan di Indonesia tetap menarik. Tidak terjadi penurunan minat meski muncul sejumlah kasus seperti yang dialami Newmont Minahasa Raya di Buyat dan PT Freeport Indonesia di Timika.

Oleh  
**KRISTANTO HARTADI/  
NICO SOMPOTAN**

"Investasi di sektor ini tetap baik. Namun harus juga dipahami bahwa investasi pertambangan itu banyak, bukan hanya yang besar-besar," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dalam percakapan dengan SH, di kantornya, pekan lalu.

Menurutnya, selama ini yang diketahui masyarakat hanyalah kiprah perusahaan-perusahaan besar, seperti Rio Tinto, Newmont, Caltex, atau Freeport. Namun, pada kenyataannya cukup banyak perusahaan asing berskala kecil dan menengah yang bergerak di sektor pertambangan di Indonesia, maupun yang akan memulai beroperasi.

"Jumlahnya lebih dari 250 investasi, dan banyak kontrak investasi itu berada di tangan para bupati. Umumnya investasi itu bergerak di bidang batu bara," ujar Purnomo.

Ia menambahkan bila ditotal perusahaan-perusahaan itu menanamkan modal mereka hingga ratusan juta

dolar AS. Itu sudah memberikan sumbangan besar bagi pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

"Maraknya perusahaan kecil dan menengah di sektor pertambangan ini merupakan tren dunia, yakni pergeseran dari dominasi perusahaan-perusahaan besar ke perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah," lanjut Purnomo.

Namun, ia tidak membantah bahwa pemain besar seperti Rio Tinto, misalnya, juga tetap berminat berinvestasi di Indonesia. Rio Tinto akan menanamkan modalnya hingga US\$ 1 miliar untuk penambangan nikel di Sulawesi Tengah dan Tenggara, yang kontraknya diharapkan bisa ditandatangani akhir tahun ini.

**Pembangkit Batu Bara**

Pada kesempatan itu, Purnomo juga mengakui bahwa pada saat ini pemerintah sedang mempersiapkan sejumlah *crash program* guna membangun pembangkit-pembangkit listrik tenaga batu bara.

"Kita mau mengganti itu dengan batu bara, yang kalau dilakukan bisa menghemat hingga Rp 35 triliun," jelas Purnomo.

Ia menerangkan, dengan keputusan pemerintah mengeluarkan subsidi BBM untuk PLN sebesar Rp 10 triliun agar TDL tidak naik, dalam tiga tahun berturut-turut subsidi itu mencapai Rp 30 triliun.

"Tetapi kalau tahun ketiga kita sudah mampu membangun pembangkit batu bara, kita sudah bisa hemat Rp 35 triliun. Artinya pembangkit dengan BBM hanya digunakan untuk *peaking*, (beban puncak-red). Kalau ini segera terwujud, kita bisa berhemat dari semula pengeluaran Rp 42 triliun menjadi Rp 5-6 triliun saja setahun," lanjut Purnomo.

Terkait dengan ini, Purnomo menegaskan BPK tidak mengatakan TDL tidak boleh naik. Biaya Pokok Penjualan (BPP) hasil auditnya lebih rendah dari hasil perhitungan PLN.

"Tetapi, kami juga memahami hasil penghitungan BPK itu menggunakan metode *post audit*, bukan *future audit*, seperti yang dihitung PLN. PLN menghitung BPP tahun 2006 dengan memadukan masa lalu dan masa depan. Ini berarti *forecast*, yang melibatkan berbagai hal, seperti perkiraan fluktuasi harga energi," katanya.

Menurut Purnomo, pemerintah harus mengikuti BPK, karena secara politik lembaga ini adalah auditor negara. "Sehingga kami juga sulit menentang BPK. Kalau sekarang harga minyak sudah mencapai US\$ 68 dan bisa naik lagi, ya, itu risikonya. Tugas kita mengisi kekurangan itu," tegasnya. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR **APR** MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **13** 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: B12

TAHUN 2006

## FLUKTUASI

### Harga tembaga terkoreksi



BELJING: Harga tembaga di Shanghai terkoreksi dari level tertinggi, akibat menurunnya permintaan China, negara pengguna komoditas terbesar di dunia.

Macquarie Bank Ltd telah memotong perkiraan pertumbuhan konsumsi tembaga China dari 12% menjadi 10% pada tahun ini.

Harga tembaga pengiriman Juli pada Shanghai Futures Exchange turun 660 yuan atau 1,2% menjadi 55,400 yuan (US\$6.918) per ton. Harga tembaga sempat diperdagangkan pada level 56.020 yuan. (BLOOMBERG/ADN)

43

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR <b>APR</b> MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <b>13</b> 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : <i>TJ</i>		TAHUN 2006

## Komisi VII DPR segera panggil 2 menteri & Freeport

*BISNIS INDONESIA*

JAKARTA: Komisi VII DPR segera memanggil Menteri ESDM dan Menkeu guna memperoleh penjelasan terperinci soal selisih laporan pendapatan negara dari PT Freeport Indonesia selama 2000 sampai dengan 2005 yang lebih rendah sebesar US\$304 juta dibandingkan laporan setoran yang diklaim perusahaan asal AS itu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sony Keraf mengatakan jika informasi tersebut benar, maka menjadi bukti ada ketidaktransparanan yang dilakukan Freeport dan pemerintah dalam menggali kekayaan tambang emas dan tembaga yang dilakukan perusahaan asal AS tersebut.

Selain memanggil pemerintah, lanjutnya, Komisi VII DPR juga berencana memanggil PT Freeport Indonesia.

"Kita akan jadwalkan pada 1 Mei nanti, dan pada minggu pertama DPR akan memanggil Menteri ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral] dan Menkeu, termasuk Freeport," ujar politisi dari Fraksi PDIP itu kepada *Bisnis*, kemarin.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, pendapatan negara yang didapat pemerintah dari PT Freeport Indonesia sejak 2000 sampai dengan 2005 ternyata lebih rendah US\$304 juta jika dibandingkan dengan laporan setoran yang

diklaim oleh perusahaan asal AS tersebut.

Sony menduga telah terjadi praktik manipulasi yang dilakukan Freeport atau pemerintah dalam menyusun laporan pendapatan perusahaan tambang tersebut kepada pemerintah yang jumlahnya sangat besar.

Jika terjadi praktik manipulasi tersebut, Sony menilai konsekuensi yang dilakukan tak sebatas upaya hukum semata, namun perlu langkah politik.

Apalagi, lanjutnya, perusahaan asal AS tersebut tidak transparan dalam menginformasikan keuntungan yang didapat dari eksplorasi tambang emas dan tembaga di Timika, Papua tersebut.

"Hingga saat ini, publik tidak mengetahui secara pasti, berapa jumlah konsentrat tembaga dan emas yang telah ditambang Freeport karena tidak ada lembaga independen yang mengkaji kandungan konsentrat tembaga dan emas di sekitar Freeport."

Sedangkan pemerintah, lanjutnya, mungkin mengetahui namun tidak menjelaskan kepada publik mengenai potensi sumber daya alam yang dikelola Freeport. "Bisa saja pemerintah tahu, tapi tidak dijelaskan kepada publik."

Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Megawati itu mengatakan pemanggilan

pemerintah dan Freeport tersebut guna mengetahui letak selisihnya, dan di mana kesalahannya.

Atau, katanya, ada upaya Freeport menghindari pajak, dengan membuat ganda pembukuan, sehingga bisa jadi laporan pendapat tidak hanya sebesar US\$2,4 miliar.

### Audit investigasi

Sementara, anggota Komisi VII DPR Alvin Lie mengatakan DPR telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit investigasi untuk mengungkap secara transparan pengelolaan keuangan yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam yang dikelola Freeport.

Menurut dia, Komisi VII DPR telah berkoordinasi dengan BPK untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

"Tak cukup memanggil pemerintah, tapi BPK harus melakukan audit investigasi terhadap Freeport."

Apalagi, Freeport selama ini tidak transparan menjelaskan keuntungan yang didapat dari pengelolaan tambang.

Memang, katanya, sebagai perusahaan, Freeport tidak berkewajiban melaporkan keuangannya. Namun, pemerintah harus membuat aturan yang harus dilaksanakan pelaku kontrak agar tidak merugikan rakyat. (M03)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

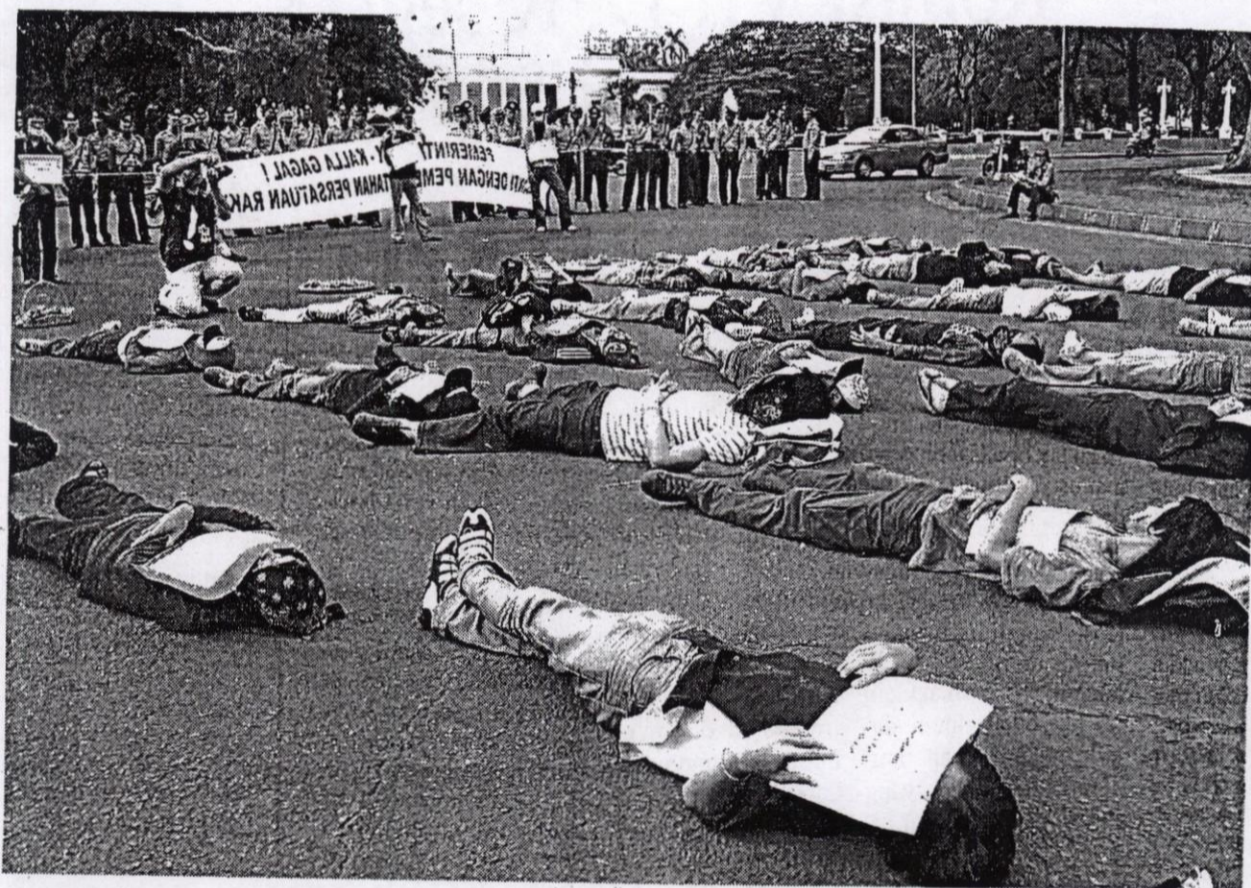
MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2006



### Mogok Makan Massal

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi mogok makan massal saat berunjuk rasa menuntut nasionalisasi pertambangan Indonesia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/4). [Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno]